

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi, R. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Graniat.
- Ali, M. (2020). *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gie, T. L. (1958). *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia Suatu Analisis tentang Masalah Desentralisasi dan Cara Penyelesaiannya*. Jakarta: Gunung Agung.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia.
- Juanda. (2004). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: PT Alumni.
- Koesoemahatmadja, R. (1979). *Pengantar Kearah Sistem Pemerintah Daerah*. Bandung: Bina Cipta.
- Kusriyah, S. (2019). *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah dalam Prespektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Semarang: Unisula Press.
- Lubis, M. S. (1978). *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alumni.
- R.H, I. G. (2011). *Pengantar Hukum Lingkungan*. Solo: Cakra Books.
- Rahmadi, T. (2011). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rahman, S. (2004). *Pembangunan dan Otonomi Daerah Realisasi Program Gotong Royong*. Jakarta: Pancar Suwuh.
- Redi, A. (2014). *Hukum Pertambangan*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Rochmanhadi. (1982). *Alat-Alat Berat dan Penggunaannya*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.
- Sinamo, N. (2010). *Perbandingan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Soedjono. (1983). *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soemartono, R. G. (1996). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemitro, R. H. (1983). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Soeprapto, M. F. (1998). *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar Pembentukannya)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soerjono, S. (2000). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sujamto. (1990). *Otonomi yang Nyata dan Bertanggungjawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suryaningrat, B. (1981). *Sejarah Pemerintahan Di Indonesia, Babak Hindia Belanda Dan Jepang*. Jakarta: Dewa Ruci.
- Suyanto, J. D. (2010). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syafiie, I. K. (2003). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Syafrudin, A. (2006). *Kapita Selekta Hakikat Otonomi & Desentralisasi dalam Pembangunan Daerah Cetakan I*. Yogyakarta: Citra Media.
- Togatorop, H. (2020). *Kupas Kejahatan Tambang Timah Bangka Belitung*. Tangerang Selatan: Pustakapedia.
- Wignjosoebroto, S. (2013). *Hukum Konsep dan Metode*. Jakarta: Setara Press.
- Jurnal:**
- Azhar, K. B. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan Vol 7 Edisi I*, 23.
- Djanggih, S. E. (2019). Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 48 (2), 153.
- Ekayanta, F. B. (2019). Ideology and Pragmatism: Discourse Factors in Infrastructure Development in Indonesia's Jokowi-JK Era. *Jurnal Politik* 4 (2), 297-328.
- Ekayanta, F. B. (n.d.). Perspektif Kelas dalam Perlawanan Warga Desa Wadas Terhadap Rencana Pembangunan Bendungan Bener. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, 19.
- Era, I. a.-J. (2019). Fredick Broven Ekayanta. *Jurnal Politik* 4 (2), 297-328.
- Geografi Hukum Proyek Startegi Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo Jawa Tengah, U. (2022). Agung Wardana. *Jurnal Hukum* 5 (1), 3.

- Harjono, D. K. (2020). Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 6 (2), 98.
- Kartono. (2009). Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Dinamika Hukum*, 285-295.
- Kartono. (2017). Analisa Konflik Hukum Wewenang Pengawasan Kegiatan Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan: 02 (01)*, 31.
- Putri, R. Z. (2015). Kajian Politik Hukum tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Law Reform 11(2)*, 200.
- Satriawan, D. D. (2021). Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Esensi Hukum 3 (2)*, 126.
- Wardana, A. (2022). Geografi Hukum Proyek Startegi Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo Jawa Tengah. *Undang: Jurnal Hukum 5 (1)*, 3.
- Wicaksono, N. D. (2016). Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Pusat. *Jurnal Legislasi Indonesia 13 (1)*, 21.

Website:

- Badan Pusat Statistik, *Letak Geografis Kabupaten Purworejo*, tersedia di website <https://purworejokab.bps.go.id/statictable/2016/04/01/24/letak-geografis.html>, diakses pada tanggal 21 Mei 2023
- Pemerintah Desa Wadas, *Profil Desa Wadas*, tersedia di website <https://wadasbener.purworejokab.go.id/artikel/2016/8/26/sejarah-des>, diakses tanggal 1 Mei 2023 Glossary “andesite”, tersedia di website magma.esdm.go.id, diakses pada tanggal 7 Mei 2023
- CNN Indonesia, 10 Februari 2022, *Peneliti BRIN Jelaskan Manfaat Batuan Andesit di Desa Wadas*, tersedia di website <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220210071417-199-757332/peneliti-brin-jelaskan-manfaat-batu-andesit-di-desa-wadas>
- Ira Sumaya et al, *Tinjauan Hukum Regulasi dan Sistem Perizinan Pertambangan Mineral dan BatuBara di Dearah*, tersedia di website:

<https://babel.bpk.go.id/tinjauan-hukum-regulasi-dan-sistem-perizinan-pertambangan-mineral-dan-batubara-di-daerah/>, Diakses pada tanggal 28 Mei 2023.

Muhammad Ubaidillah, *Kajian Kelayakan Penambangan Batuan Andesit PT. Trinusa Bangun Perkasa di Desa Karang Sari Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Jawa Barat Tahun 2015*, hlm 31, tersedia di website [https://www.academia.edu/3289786/Kajian Kelayakan Penambangan di Desa Karang Sari Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat,diakses tanggal 1 Mei 2023](https://www.academia.edu/3289786/Kajian_Kelayakan_Penambangan_di_Desa_Karangsari_Kecamatan_Cipongkor_Kabupaten_Bandung_Barat_Provinsi_Jawa_Barat,diakses_tanggal_1_Mei_2023)

Dokumen Reklamasi PT. Gunung Bumi Perkasa Tahun 2017, hlm. 50, tersedia di website [https://www. https://gbp-quarry.com/](https://www.gbp-quarry.com/), diakses tanggal 1 Mei 2023

